



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Gedung PLUT JL. H. Muhammad Siantan, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas
Kepulauan Riau 29791, Pos-el : disperindagkop@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 5 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, perlu ditunjuk Pejabat/Panitia Pengelola Kegiatan;
- b. Pejabat / Panitia Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom (a) adalah :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. bahwa untuk keperluan huruf (a) di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 675);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
14. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (PA_KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MENGUBAH LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENUJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.**

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Pejabat / Panitia Pengelola Kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat/Panitia Pengelola Kegiatan menilai kinerja penyedia.

1. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penujukan Penyedia Barang / Jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja penyedia

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut:

- a. meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. melakukan Verifikasi SPP;
- d. menyapaikan SPM;
- e. melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melakukan Akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:

- a. membantu Pengguna Anggaran dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);

- c. menyusun jadwal setiap kegiatan serta menjalankannya dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- d. menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa kemudian disampaikan kepada bendahara pengeluaran / pembantu bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- e. membantu menyimpan serta menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan;
- f. membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan selesai dilakukan dan menyerahkan laporan tersebut kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
- g. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan yang terkait berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- h. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait progress capaian fisik pekerjaan bersama dengan PPKom dan Tim Teknis;
- i. menandatangani berita acara hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa bersama PPKom dan Pejabat lainnya yang ditunjuk.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini dimulai dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 2 Februari 2026

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian,



Japrizal, S.Kom., MA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197501202003121008

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 5 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Februari 2026

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Japrizal, S.Kom</u> NIP. 197501202003121008	Pembina Utama Muda (IV/c)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
2	<u>DEWI NOLLY, SH., M.H.</u> NIP 198111262010012013	Pembina (IV.a)	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian,



Japrizal, S.Kom., MA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197501202003121008

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas
 Nomor : 5 TAHUN 2026
 Tanggal : 2 Februari 2026

NO	URAIAN SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
1	2	
1	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah • Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<p><u>SAID FAISAL KURNIAWAN, S.T</u> NIP 199501012019021002</p>
2	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	<p><u>HADIS NIRBETA, S.E</u> NIP 199202042020121006</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran 	<u>HADIS NIRBETA, S.E</u> NIP 199202042020121006
3	<p>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan <p>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi <p>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota <p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan <p>Program Pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orentasi Peningkatan Sekala Usaha Menjadi Usaha Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 	<u>ISMA SUSANTI, S.E.</u> NIP 197805012010012006

4	<p>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <p>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di ditingkat Agen dan Pasar Rakyat <p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 	<p style="text-align: center;"><u>NOPRIYADI, ST</u> NIP. 198011022011011002</p>
5	<p>Program Perencanaan dan Pengembangan Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusun dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat <p>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 	<p style="text-align: center;"><u>ABDUL HALIM, S.Pd</u> NIP 197504252010011008</p>
6	<p>Program Hubungan Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja serta Pengupahan - Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja <p>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi <ul style="list-style-type: none"> • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi <p>Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan antar Kerja 	<p style="text-align: center;"><u>M. KASIM, S.Pi</u> NIP. 199011112014041001</p>

7	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro • Pemulihan Usaha Mikro <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan Blud <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 	<p style="text-align: center;"><u>DEDI WAHYUDI, S.E.</u> NIP 198207212010011018</p>
8	<p>Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Dan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 	<p style="text-align: center;"><u>EVIANSYAH, S.I.P</u> NIP 197912052002122010</p>

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian,



Japrizal, S.Kom., MA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197501202003121008